

## POTENSI AMENSALISME ANTAR ETNIS MELAYU DAN ETNIS CINA DI PERBAUNGAN SERDANG BEDAGAI

Nuriza Dora<sup>1</sup>, M. Irham Arief Ramadhan<sup>2</sup>, Kesya Lamuntazor<sup>3</sup>  
[nurizadora@uinsu.ac.id](mailto:nurizadora@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [irhamarief29@gmail.com](mailto:irhamarief29@gmail.com)<sup>2</sup>, [keymuntazor@gmail.com](mailto:keymuntazor@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

### Abstrak

Penelitian ini membahas potensi amensalisme antara etnis Melayu dan etnis Cina di Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Amensalisme dalam konteks ini dipahami sebagai ketimpangan sosial-ekonomi, di mana satu kelompok merasa dirugikan meskipun pihak lain tidak secara langsung bermaksud merugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan potensi amensalisme dan dampaknya terhadap hubungan antaretnis. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, warga dari kedua etnis, serta pemuda lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi ekonomi oleh etnis Cina, perbedaan budaya, minimnya interaksi sosial yang intens, serta keterbatasan akses etnis Melayu terhadap modal dan jaringan usaha menjadi pemicu utama kesenjangan. Fenomena amensalisme juga diperkuat oleh ketimpangan representasi dalam pengambilan keputusan dan kurangnya forum dialog terbuka. Meskipun hubungan umumnya rukun, masih terdapat kecemburuan sosial dan sikap saling curiga yang berpotensi menimbulkan konflik laten. Beberapa warga Tionghoa merasa seperti "tamu di kampung sendiri", sementara sebagian warga Melayu merasa tertinggal secara struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi amensalisme dapat ditekan melalui program inklusif seperti pendidikan multikultural, pelatihan ekonomi lintas etnis, pembentukan koperasi bersama, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial-budaya. Dengan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta harmoni yang berkelanjutan dan hubungan antaretnis yang lebih adil dan setara di Perbaungan.

**Kata Kunci:** Potensi Amensalisme, Etnis Melayu, Etnis Cina.

### Abstract

*This research discusses the potential for amensalism between ethnic Malays and ethnic Chinese in Perbaungan, Serdang Bedagai Regency. Amensalism in this context is understood as socio-economic inequality, where one group feels disadvantaged even though the other party does not directly intend to harm. The purpose of this study is to identify the main factors that lead to potential amensalism and its impact on interethnic relations. Using a descriptive qualitative method, data was obtained through in-depth interviews with community leaders, residents from both ethnicities, as well as local youth. The results showed that economic dominance by the Chinese, cultural differences, lack of intense social interaction, and limited access of ethnic Malays to capital and business networks are the main triggers of the gap. The phenomenon of amensalism is also reinforced by the inequality of representation in decision-making and the lack of open dialogue forums. Although relations are generally harmonious, there is still social jealousy and mutual suspicion that has the potential to cause latent conflict. Some Chinese feel like "guests in their own village", while some Malays feel structurally left behind. This research concludes that the potential for amensalism can be reduced through inclusive programs such as multicultural education, cross-ethnic economic training, the establishment of joint cooperatives, and active involvement in socio-cultural activities. With collaborative efforts involving the*

*government and the community, it is hoped that sustainable harmony and fairer and more equal inter-ethnic relations will be created in Perbaungan.*

**Keywords:** *Potential Amensalism, Ethnic Malay, Ethnic Chinese.*

## **PENDAHULUAN**

Perbaungan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah daerah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, terutama orang Melayu dan orang Cina. Seharusnya keberagaman ini bisa menjadi kekuatan dan membuat hidup bersama lebih baik. Tapi kenyataannya, hubungan antara kedua kelompok ini kadang tidak berjalan seimbang.

Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Orang Cina di Perbaungan banyak yang memiliki toko, pasar, dan usaha besar. Sedangkan orang Melayu lebih banyak menjadi pekerja atau pembeli saja, sehingga mereka kurang punya kesempatan untuk maju secara ekonomi.

Masalah ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal pendidikan dan peran dalam pengambilan keputusan. Anak-anak orang Cina biasanya lebih mudah mendapatkan pendidikan yang bagus, sementara anak-anak orang Melayu masih banyak yang terbatas kesempatan belajarnya. Orang Cina juga lebih banyak tinggal dan membuka usaha di tempat yang strategis, sedangkan orang Melayu lebih banyak tinggal di desa atau pinggiran. Selain itu, hubungan sosial antara orang Melayu dan Cina kurang akrab. Mereka jarang ikut kegiatan bersama di luar urusan bisnis (Evers & Korff, 2002). Hal ini bisa membuat mereka saling menjauh dan muncul prasangka negatif satu sama lain. Karena semua hal itu, potensi terjadinya amensalisme, yaitu situasi di mana satu kelompok dirugikan sementara kelompok lain diuntungkan, sangat mungkin terjadi di Perbaungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebabnya supaya bisa mencari cara agar hubungan antar etnis di Perbaungan bisa lebih baik dan seimbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara etnis Melayu dan etnis Cina yang tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada ketimpangan atau ketidakseimbangan yang membuat salah satu kelompok, khususnya masyarakat Melayu, merasa dirugikan. Penelitian ini juga ingin mencari tahu apa saja penyebab utama munculnya potensi amensalisme, seperti dominasi usaha oleh etnis Cina, perbedaan tempat tinggal yang strategis atau tidak, serta perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pola interaksi sosial antara kedua etnis, termasuk sejauh mana prasangka atau stereotip negatif mempengaruhi hubungan mereka. Penelitian ini juga ingin menilai apakah masyarakat Melayu di Kecamatan Perbaungan sudah memiliki keterwakilan yang cukup dalam pengambilan keputusan di pemerintahan dan lembaga sosial. Dengan penelitian ini, diharapkan muncul gagasan dan solusi agar hubungan antara etnis Melayu dan Cina di Kecamatan Perbaungan bisa menjadi lebih seimbang, adil, dan harmonis ke depannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2004). Artinya, penelitian ini tidak memakai angka, tapi lebih fokus pada cerita, pandangan, dan pengalaman orang-orang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Penelitian ini ingin tahu lebih dalam tentang hubungan antara etnis Melayu dan etnis Cina yang tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, terutama soal kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

Peneliti melakukan tiga cara dalam mengumpulkan data Pertama, melihat langsung (observasi) kehidupan orang Melayu dan Cina di pasar, tempat tinggal, dan tempat usaha untuk memahami cara mereka berinteraksi. Kedua, peneliti melakukan wawancara langsung dengan warga, seperti tokoh masyarakat, pedagang, orang Melayu dan Cina, serta perangkat desa atau kecamatan yang tahu tentang hubungan antar etnis di Perbaungan. Mereka dipilih karena dianggap tahu dan paham masalah ini. Ketiga, peneliti juga mengumpulkan dokumen atau data tertulis, seperti foto, berita lokal, dan catatan dari pemerintah setempat.

Setelah semua data terkumpul, peneliti membaca dan memahami isi datanya, lalu mencari pola atau perbedaan yang muncul dari informasi yang ada (Muri Yusuf, 2017). Dari sana, peneliti menarik kesimpulan tentang masalah dan ketimpangan yang terjadi antara orang Melayu dan Cina. Dengan cara ini, peneliti berharap bisa menggambarkan secara jelas potensi amensalisme yang terjadi antara kedua etnis di Kecamatan Perbaungan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rajab selaku Ketua Lingkungan (Kepling) di Kecamatan Perbaungan, hubungan antara warga etnis Melayu dan Tionghoa pada dasarnya cukup rukun dan kondusif. Meski terdapat jarak dalam interaksi sosial dan keterlibatan kegiatan keagamaan, kedua kelompok tetap menunjukkan sikap saling menghormati. Namun demikian, terdapat indikasi amensalisme secara sosial-ekonomi, di mana sebagian warga Melayu merasa tertinggal karena dominasi ekonomi oleh warga Tionghoa, yang seringkali menimbulkan rasa iri atau ketegangan kecil seperti sindiran, terutama dalam konteks bantuan usaha atau keberhasilan bisnis.

Interaksi anak-anak dari kedua etnis terjadi di ruang sekolah, tetapi jarang berlanjut di luar. Tokoh masyarakat dan Ketua RT berperan aktif menjaga kerukunan melalui fasilitasi komunikasi, meskipun program lintas etnis dari pemerintah masih minim dan belum berkesinambungan. Dukungan konkret dari Ketua RT sudah mulai diarahkan ke pembentukan forum diskusi warga, koperasi lintas etnis, dan kegiatan budaya bersama.

Kendala yang dihadapi warga Melayu dalam mengembangkan usaha terutama terkait modal dan akses informasi, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan usaha dari pemerintah secara adil. Generasi muda dinilai lebih terbuka dan potensial sebagai agen perubahan, namun masih membutuhkan wadah kolaboratif nyata. Media sosial dapat menjadi jembatan atau jurang, tergantung bagaimana penggunaannya.

Keseluruhan wawancara menggambarkan bahwa meskipun tidak terjadi konflik

terbuka, potensi ketegangan akibat kesenjangan sosial-ekonomi dan kurangnya integrasi budaya masih ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berbasis komunitas, kolaboratif, dan berkelanjutan demi terciptanya harmoni antar etnis di wilayah tersebut.

Wawancara dengan Suhu Lim Wei Seng, seorang tokoh Tionghoa dan pengurus Kelenteng Thian Bou di Kecamatan Perbaungan, mengungkapkan bahwa hubungan antara komunitas Tionghoa dan Melayu secara umum berlangsung damai dan berdampingan. Namun, terdapat jarak dalam interaksi sosial dan budaya yang masih terasa. Meski tidak pernah terjadi konflik terbuka, perasaan kecemburuan sosial dan amensalisme muncul akibat dominasi ekonomi oleh komunitas Tionghoa yang secara budaya lebih terbiasa berdagang, sehingga warga Melayu kadang merasa tertinggal atau dirugikan, meskipun kenyataannya tidak semua warga Tionghoa hidup berkecukupan.

Suhu menekankan bahwa ketimpangan ini lebih disebabkan oleh minimnya interaksi sosial dan dialog terbuka antaretnis. Kegiatan lintas budaya dan sosial yang melibatkan kedua etnis masih sangat jarang, sementara tempat ibadah seperti kelenteng pun sebenarnya terbuka untuk umum namun belum banyak diakses oleh warga non-Tionghoa karena adanya rasa sungkan atau belum terbiasa.

Suhu juga menyampaikan bahwa komunitas Tionghoa sering merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tingkat lokal, meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat yang sama. Ia menyerukan pentingnya pendidikan multikultural, forum dialog antarbudaya, dan pelibatan lintas etnis dalam kegiatan masyarakat agar prasangka tidak terus berkembang, apalagi di kalangan generasi muda yang semakin terpengaruh oleh media sosial dan tekanan ekonomi digital.

Secara khusus, Suhu mengajak semua pihak untuk membangun kepercayaan dan kerja sama, bukan hanya fokus pada hasil, tetapi juga saling memahami proses perjuangan masing-masing etnis. Ia optimis bahwa masa depan hubungan antar komunitas di Perbaungan bisa lebih harmonis jika semua pihak memiliki kemauan untuk menghapus sekat-sekat eksklusivitas dan membuka diri terhadap perbedaan. Doa dan harapannya adalah agar masyarakat hidup damai, saling menghargai, dan menjalin cinta kasih tanpa prasangka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosmaini, seorang ibu rumah tangga beretnis Melayu di Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara komunitas Tionghoa dan Melayu di wilayah tersebut berlangsung relatif damai dan koeksisten. Masyarakat dari kedua etnis telah hidup berdampingan cukup lama dan sering berinteraksi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, seperti jual beli dan pendidikan anak. Namun, interaksi sosial dan budaya yang lebih dalam masih terbatas, sehingga menyebabkan jarak dalam hubungan emosional dan kebersamaan.

Ibu Rosmaini menyadari adanya persepsi kecemburuan sosial yang berkembang, khususnya terkait dominasi ekonomi oleh warga Tionghoa, meskipun menurutnya hal tersebut lebih merupakan kesalahpahaman daripada niat untuk merugikan. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk amensalisme sosial, di mana satu pihak merasa dirugikan tanpa ada maksud dari pihak lain.

Komunitas Tionghoa sendiri, menurut Ibu Rosmaini, seringkali memilih bersikap diam untuk menjaga harmoni, meskipun sebenarnya mereka menginginkan ruang dialog dan keterlibatan lebih dalam kegiatan lintas etnis. Kelenteng di wilayah tersebut bahkan terbuka bagi umum dan pernah mengundang warga Melayu dalam acara bakti sosial dan Imlek, meskipun partisipasi masih rendah karena keterbatasan komunikasi dan kekhawatiran akan kesalahpahaman.

Dalam pandangannya, solusi utama untuk mengatasi potensi konflik dan kesalahpahaman adalah melalui pendidikan multikultural sejak dini, forum dialog antarbudaya yang diinisiasi oleh pemerintah lokal, serta pembangunan empati lintas etnis di kalangan warga. Ia juga menyoroti peran media lokal yang seharusnya lebih banyak menampilkan kisah kolaborasi daripada fokus pada isu-isu sensasional.

Terkait akses ekonomi, Ibu Rosmaini menilai bahwa ketimpangan bukan terjadi karena diskriminasi, melainkan lebih kepada warisan structural di mana warga Tionghoa mewarisi usaha keluarga, sementara warga Melayu banyak yang memulai dari nol. Ia menekankan pentingnya pelibatan etnis Tionghoa dalam perencanaan program pemerintah serta mendorong masyarakat untuk membangun kepercayaan dan kerja sama demi keharmonisan jangka panjang.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa masyarakat Perbaungan memiliki potensi besar untuk membangun kerukunan lintas etnis yang lebih erat, asalkan ada ruang komunikasi yang adil, niat saling memahami, dan dukungan aktif dari pemerintah dan tokoh masyarakat.

Wawancara dengan Muhammad Risky, seorang pemuda Melayu berusia 28 tahun dari Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antar etnis, khususnya antara etnis Melayu dan Tionghoa di wilayah tersebut. Menurut Risky, generasi muda bisa menjadi jembatan sosial untuk menciptakan ruang kolaboratif yang inklusif, melalui kegiatan sosial, budaya, dan musyawarah bersama.

Risky memiliki pengalaman positif bekerja sama dengan pemuda dari etnis Tionghoa dalam kegiatan lintas budaya seperti festival dan kegiatan sosial. Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antaretnis dapat diperkuat melalui pengalaman bersama yang membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan.

Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat tantangan, seperti perbedaan budaya, bahasa, serta kesenjangan ekonomi dan sosial, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat keharmonisan. Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya pendidikan lintas budaya, peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan sosial bersama, serta komunikasi terbuka antara kedua komunitas.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam menciptakan masyarakat multikultural yang harmonis, selama diberikan ruang, dukungan, dan wadah untuk berkolaborasi. Risky juga menunjukkan sikap terbuka, inklusif, dan penuh semangat untuk menjadi bagian dari solusi sosial dalam konteks keberagaman etnis di Perbaungan.

Wawancara dengan Ibu Mei Lin, seorang ibu rumah tangga etnis Tionghoa yang telah menetap di Perbaungan sejak tiga generasi, mengungkapkan bahwa hubungan antara

komunitas Tionghoa dan Melayu secara umum berjalan damai namun tidak sepenuhnya akrab. Mereka hidup berdampingan, saling mengenal, dan kerap berinteraksi dalam kegiatan umum seperti gotong royong atau acara syukuran, namun masih terasa adanya batas sosial yang membuat sebagian warga Tionghoa merasa seperti —tamu di kampung sendiri.¶

Ibu Meu Lin menyampaikan adanya ketimpangan persepsi, di mana komunitas Tionghoa sering dianggap "lebih mampu" oleh sebagian warga Melayu. Padahal menurutnya, kehidupan warga Tionghoa juga tidak selalu mudah—mereka hanya berupaya hidup dengan bekerja keras. Ia mengakui bahwa kemungkinan amensalisme sosial memang terjadi: pihak Tionghoa tidak bermaksud merugikan siapa pun, namun keberadaan mereka kadang dianggap mengganggu oleh sebagian warga lain karena perbedaan ekonomi yang mencolok.

Dalam pandangannya, salah paham dan kecanggungan sosial lebih sering muncul karena minimnya komunikasi terbuka dan kurangnya kedekatan emosional antaretnis. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun jembatan dialog dan saling mengenal untuk mencegah prasangka dan kecemburuan yang tidak berdasar.

Secara keseluruhan, Ibu Meu Lin menunjukkan sikap terbuka dan penuh harapan akan terciptanya hubungan yang lebih inklusif dan harmonis antara warga Melayu dan Tionghoa di Perbaungan. Ia percaya bahwa apabila masyarakat saling memahami dan menghargai satu sama lain tanpa prasangka, maka kebersamaan sejati bisa tumbuh dan memperkuat kohesi sosial lintas etnis di lingkungan tersebut.

## **Pembahasan**

Penyebab Potensi Amensalisme Antar Etnis di Perbaungan

### 1. Dominasi Ekonomi oleh Etnis Cina

Di Perbaungan, banyak toko, pasar, dan usaha besar dimiliki oleh orang Cina, sementara orang Melayu sebagian besar bekerja sebagai karyawan, buruh, atau hanya berperan sebagai konsumen. Kondisi ini menyebabkan orang Melayu memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, sehingga kesulitan untuk berkembang secara mandiri. Sebaliknya, dominasi etnis Cina dalam sektor usaha memperkuat posisi ekonomi mereka dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Ketimpangan ini menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara kedua kelompok etnis, di mana pihak etnis Cina memperoleh keuntungan lebih besar, sementara etnis Melayu cenderung berada dalam posisi yang dirugikan, baik secara sosial maupun ekonomi (Habib, 2004).

### 2. Orang Cina Tinggal dan Usaha di Tempat Strategis

Kebanyakan orang Cina di Perbaungan tinggal di pusat kota atau dekat dengan area pasar, serta memiliki tempat usaha di lokasi yang ramai dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, orang Melayu umumnya menetap di desa atau di daerah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Perbedaan lokasi tempat tinggal dan usaha ini membuat orang Melayu kesulitan untuk bersaing dalam dunia ekonomi, karena posisi mereka yang kurang strategis membatasi akses terhadap peluang usaha, pelanggan, dan jaringan bisnis yang lebih luas (Munizu et al., 2023).

### 3. Kesempatan Belajar yang Tidak Sama

Anak-anak dari keluarga Cina di Perbaungan umumnya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, seperti sekolah unggulan, kursus, atau pelatihan kerja, bahkan banyak di antara mereka yang dapat melanjutkan pendidikan ke luar kota atau

luar negeri. Sebaliknya, sebagian besar anak dari keluarga Melayu hanya mampu bersekolah hingga tingkat tertentu karena keterbatasan biaya dan fasilitas yang memadai. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kemampuan bersaing orang Melayu dalam dunia kerja dan bisnis, karena mereka tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang setara untuk menghadapi tantangan ekonomi modern (Bairizki, 2020).

#### 4. Jarang Ada Kegiatan Bersama

Orang Melayu dan Cina di Perbaungan jarang berinteraksi di luar aktivitas jual beli, sehingga hubungan mereka terbatas pada urusan ekonomi semata. Mereka jarang terlibat dalam kegiatan bersama seperti gotong royong, acara budaya, atau kegiatan sosial lainnya yang dapat mempererat hubungan antarwarga. Akibatnya, hubungan sosial antara kedua etnis ini terasa kaku, jauh, dan kurang akrab. Kurangnya komunikasi dan kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari memicu tumbuhnya prasangka dan ketidaksukaan, yang pada akhirnya memperbesar jarak emosional dan memperlemah kohesi sosial di antara mereka.

#### 5. Adanya Anggapan Buruk antar Etnis

Di tengah kehidupan masyarakat Perbaungan, berkembang anggapan-anggapan umum yang cenderung negatif, seperti —orang Cina pelit dan hanya peduli uang<sup>1</sup> atau

—orang Melayu malas dan tidak mau usaha.<sup>2</sup> Meskipun stereotip ini tidak sepenuhnya benar dan tidak berlaku untuk semua individu, kepercayaan yang terus-menerus terhadap pandangan semacam ini dapat menimbulkan prasangka, saling curiga, dan bahkan penolakan untuk bekerja sama antar etnis. Jika tidak diluruskan, asumsi-asumsi keliru ini dapat memperkuat jarak sosial dan menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 6. Orang Melayu Kurang Dilibatkan dalam Keputusan Penting

Dalam struktur pemerintahan lokal, organisasi sosial, maupun kelompok pengambil keputusan di Perbaungan, orang Melayu tidak selalu memiliki perwakilan yang kuat atau signifikan. Kondisi ini menyebabkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat Melayu sering kali tidak tersampaikan atau kurang diperhatikan. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan yang dirancang cenderung tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Melayu, sehingga mereka merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang seharusnya bersifat inklusif.

#### 7. Ketergantungan Ekonomi yang Berlebihan

Sebagian besar toko dan usaha besar di Perbaungan dimiliki oleh orang Cina, orang Melayu menjadi sangat tergantung kepada mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam mencari pekerjaan. Ketergantungan ini membuat orang Melayu tidak memiliki banyak alternatif selain mengikuti aturan dan kondisi pasar yang dikendalikan oleh etnis lain. Situasi ini semakin memperkuat posisi tidak menguntungkan bagi orang Melayu, karena mereka tidak memiliki kendali atau daya tawar yang cukup dalam sistem ekonomi lokal yang ada.

#### 8. Kurangnya Dukungan Usaha Bagi Orang Melayu

Banyak orang Melayu di Perbaungan yang memiliki keinginan untuk membuka usaha sendiri, namun terkendala oleh keterbatasan modal, kurangnya pelatihan kewirausahaan, dan minimnya jaringan bisnis. Di sisi lain, orang Cina umumnya sudah memiliki jaringan usaha yang luas dan kuat, serta tradisi saling membantu di antara sesama mereka, yang memperkuat posisi mereka dalam dunia bisnis. Tanpa adanya dukungan yang memadai, baik dari segi akses permodalan maupun pengembangan kapasitas, usaha orang Melayu cenderung sulit berkembang dan mudah kalah bersaing di tengah dominasi ekonomi yang sudah mapan.

#### 9. Perbedaan Cara Hidup dan Budaya

Orang Cina dan Melayu di Perbaungan memiliki cara hidup, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, baik dalam hal makanan, gaya berdagang, maupun cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan ini sebenarnya merupakan kekayaan budaya yang bisa saling melengkapi, namun jika tidak dikelola dengan baik justru dapat menimbulkan rasa tidak cocok, kesalahpahaman, atau bahkan mendorong kedua kelompok untuk saling menjauh. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan ini berpotensi memperlemah kohesi sosial dan menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif.

#### 10. Kurangnya Program Pemerintah yang Mendorong Kesetaraan Etnis

Program-program yang bertujuan untuk menyetarakan kondisi antara etnis, seperti pelatihan usaha, bantuan modal, atau pembinaan kerjasama antar kelompok, masih sangat minim di Perbaungan. Kurangnya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah atau lembaga terkait membuat kesenjangan sosial dan ekonomi antara etnis yang lebih dominan dan yang lebih lemah terus melebar. Tanpa intervensi yang efektif, ketimpangan ini sulit diatasi dan berisiko memperkuat ketegangan serta memperburuk hubungan antar etnis di masyarakat.

Dominasi ekonomi oleh etnis Cina menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan antara etnis Melayu dan Cina di Perbaungan. Mayoritas toko, pasar, dan usaha besar dikuasai oleh orang Cina, sementara orang Melayu lebih banyak berperan sebagai pekerja atau konsumen. Ketimpangan ini membatasi akses ekonomi orang Melayu sehingga sulit bagi mereka untuk mandiri dan berkembang secara ekonomi, sementara etnis Cina justru semakin menguatkan posisi ekonominya. Letak geografis tempat tinggal dan usaha turut memperkuat dominasi ekonomi tersebut. Orang Cina biasanya tinggal dan menjalankan usaha di pusat kota atau area strategis yang ramai, sementara orang Melayu lebih banyak menetap di daerah pedesaan atau lokasi yang kurang strategis. Perbedaan ini menghambat akses orang Melayu terhadap peluang usaha dan jaringan bisnis yang luas, sehingga mereka kesulitan bersaing dalam dunia ekonomi.

Kesempatan belajar yang tidak merata juga memperparah ketimpangan. Anak-anak dari keluarga Cina umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, bahkan berpeluang melanjutkan pendidikan ke luar kota atau luar negeri. Sebaliknya, anak-anak Melayu seringkali terbatas oleh biaya dan fasilitas, sehingga kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan bisnis modern. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan bersaing etnis Melayu di sektor ekonomi.

Interaksi sosial antara etnis Melayu dan Cina juga sangat terbatas dan umumnya hanya terjadi dalam konteks jual beli. Kegiatan bersama seperti gotong royong, acara budaya, atau kegiatan sosial lainnya jarang dilakukan bersama, sehingga hubungan sosial terasa kaku dan jauh. Kurangnya komunikasi dan kebersamaan ini memungkinkan berkembangnya prasangka serta ketidaksukaan yang memperlebar jarak emosional dan melemahkan kohesi sosial antar kedua kelompok (Nur, 2016).

Berkembangnya anggapan negatif atau stereotip antar etnis semakin memperkeruh hubungan. Persepsi seperti —orang Cina pelitl atau —orang Melayu malasl yang terus beredar tanpa diluruskan menimbulkan prasangka dan saling curiga. Stereotip ini bisa menghambat kerja sama dan memperkuat jarak sosial yang sudah ada.

Dalam ranah politik dan pengambilan keputusan, orang Melayu kurang terwakili secara signifikan dalam struktur pemerintahan lokal maupun organisasi sosial. Ketidakhadiran suara mereka menyebabkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Melayu sering terabaikan, sehingga kebijakan yang dibuat kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini menimbulkan rasa terpinggirkan yang memperkuat ketegangan sosial.

Ketergantungan ekonomi orang Melayu pada usaha milik etnis Cina juga menjadi persoalan serius. Karena sebagian besar kebutuhan dan lapangan kerja dikuasai oleh etnis Cina, orang Melayu harus bergantung pada mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini mengurangi daya tawar dan kendali ekonomi orang Melayu, memperkuat posisi mereka yang kurang menguntungkan dalam sistem ekonomi lokal.

Dukungan terhadap pengembangan usaha orang Melayu juga masih sangat terbatas. Keterbatasan modal, kurangnya pelatihan kewirausahaan, dan minimnya jaringan bisnis membuat usaha Melayu sulit berkembang. Sebaliknya, etnis Cina telah memiliki jaringan usaha yang kuat dan tradisi saling membantu antar sesama anggota komunitasnya, sehingga semakin memperkuat dominasi ekonomi mereka.

Perbedaan budaya dan gaya hidup antara etnis Cina dan Melayu juga menjadi tantangan tersendiri. Meski sesungguhnya bisa menjadi kekayaan budaya, jika tidak dikelola dengan baik perbedaan ini menimbulkan rasa tidak cocok, kesalahpahaman, dan jarak sosial yang lebih besar. Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan tersebut menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif (Rahman et al., 2024).

Minimnya program pemerintah yang secara khusus mendorong kesetaraan antar etnis memperburuk ketimpangan. Kurangnya kebijakan dan dukungan yang efektif dalam hal pelatihan, bantuan modal, dan pembinaan kerja sama antar kelompok membuat kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Tanpa intervensi yang tepat, potensi konflik dan ketegangan antaretnis di Perbaungan sulit dihindari dan justru berisiko meningkat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi amensalisme antara etnis Melayu dan Cina di Kecamatan Perbaungan terutama disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti dominasi ekonomi oleh etnis Cina, penguasaan wilayah strategis, dan kesenjangan dalam akses pendidikan. Faktor-faktor ini diperparah oleh minimnya interaksi

sosial yang harmonis, berkembangnya stereotip negatif, dan keterwakilan politik yang tidak seimbang yang membuat etnis Melayu merasa terpinggirkan. Ketergantungan ekonomi masyarakat Melayu pada usaha milik etnis Cina, keterbatasan modal dan jaringan bisnis, serta perbedaan budaya yang kurang dikelola turut memperkuat jarak sosial antara kedua kelompok. Hasil wawancara dengan lima informan dari etnis Melayu dan Tionghoa menunjukkan bahwa hubungan antaretnis berjalan damai namun masih menyisakan jarak dalam aspek sosial dan budaya, dengan kecemburuan sosial dan kesalahpahaman yang muncul akibat kurangnya dialog serta keterlibatan dalam kegiatan bersama. Minimnya program lintas etnis dari pemerintah juga menjadi faktor penghambat. Meskipun demikian, para tokoh masyarakat dan pemuda menunjukkan optimisme bahwa melalui pendidikan multikultural, forum komunikasi terbuka, program ekonomi inklusif, dan keterwakilan politik yang adil, harmoni antaretnis dapat terus ditumbuhkan secara inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi potensi amensalisme serta membangun masyarakat Perbaungan yang lebih harmonis, adil, dan setara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Z., & Farahita, A. T. (2024). Hukum Internasional Dun Hak Asasi Manusia Studi Kasus Rusia Dan Ukraina. *Humani*, 1(3).
- Agustian, M. (2019). Pendidikan Multikultural. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Akhmad, N. (2020). Ensiklopedia keragaman budaya. Alprin.
- Bairizki, A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1 (Vol. 1). Pustaka Aksara.
- Blauner, B. (1972). Racial oppression in America. (No Title).
- Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. *University of California Press Google Schola*, 2, 17–38.
- Dahrendorf, R. (2019). Class and class conflict in industrial society. In *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, Second Edition* (pp. 105–111). Routledge.
- Evers, H.-D., & Korff, R. (2002). Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Habib, A. (2004). Konflik antar etnik di pedesaan. *Lkis Pelangi Aksara*.
- Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) hal. 112.
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Kardini, N. L., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muri Yusuf, A. (2017). Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan.
- Nur, R. (2016). Konservasi Kearifan Budaya Lokal dalam Proses Interaksi Sosial Etnis Melayu di Kabupaten Batu Bara. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 325–348.
- Rahman, M. T., Bustomi, J., & Waehama, M. R. (2024). Multikulturalisme, moderasi

beragama, dan tantangan identitas di Thailand Selatan. Gunung Djati Publishing.

Wati, N. S., bin Usman Imam, L. L., Subandowo, D., Fandela, F., Saputra, M. D., Pariska, N., Mirayanti, Y., & Musyafa, W. (2024). Pemberdayaan Forum Dialog Antaragama untuk Meningkatkan Toleransi Beragama di Desa Rajabasa Lama II. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 203–210.